



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR: 892/III/XII/2015

KOMISI X DPR SOSIALISASI RUU KEBUDAYAAN DI MOJOKERTO



**PENTINGNYA
PENGATURAN SISTEM
PERBUKUAN**



**INDONESIA PERLU
BELAJAR PERTANIAN
PADA TIONGKOK**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



KOMISI X DPR SOSIALISASI RUU KEBUDAYAAN DI MOJOKERTO

Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mensosialisasikan dan menjangring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (5/12/2015).

Saat pertemuan Tim dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Ridwan menjelaskan delapan point utama Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang diharapkan mampu membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia.

“Delapan item tersebut yang pertama adalah penguatan hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, pelestarian sejarah dan budaya. Selain itu juga ada pembinaan kesenian, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan Pranata SDM kebudayaan serta sarana dan prasarana budaya,” katanya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, Jawa Timur.

RUU tentang kebudayaan sudah lama dibahas tetapi masih belum disahkan hingga pergantian anggota dewan.

“Oleh karena itu, tujuan kami ke Trowulan ini untuk melihat dari dekat permasalahan yang ada untuk diakomodir dalam RUU tersebut,” katanya.

Undang-undang ini, jelas Ridwan, dibuat dalam rangka agar kebudayaan Indonesia terlindungi dan Jawa Timur merupakan wilayah peninggalan sejarah yang tinggi.



Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisjam mensosialisasikan dan menjangring masukan di Mojokerto

“Jatim khususnya Trowulan ini memiliki kebudayaan yang tinggi dan juga melahirkan seni budaya, adat istiadat, naskah kuno serta artefak,” imbuhnya.

Kedepan, lanjut Ridwan, Indonesia di 2019 mengharapakan supaya pariwisata menjadi andalan devisa nomor satu.

“Saat ini yang menjadi andalan devisa masih berasal dari gas, batu bara, perkebunan dan yang keempat adalah bidang Pariwisata,” imbuh politisi Partai Golkar Dapil Jawa Timur ini.

Sementara itu, pada tahun 2015 Kementerian Pariwisata menargetkan sebanyak 10 juta orang wisatawan asing datang ke Indonesia.

“Tahun 2016 meningkat menjadi 12 juta orang dan diperkirakan pada

tahun 2019 ditargetkan sebanyak 20 juta orang wisatawan asing masuk ke Indonesia,” katanya.

Dalam kunjungan ke Trowulan, Mojokerto tersebut anggota Tim Panja Komisi X antara lain Wiryanti Sukamdani dari PDI-Perjuangan, Reni Marlinawati dari PPP, Bambang Sutrisno dan Jhon Kennedy Azis dari Golkar, Ida Bagus Putu Sukarta dari Gerindra dan Yayuk Sri Rahayuningsih dari Nasdem.

Setelah pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dihadiri pula budayawan Mojokerto, Tim Panja melakukan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara Mojopahit Trowulan, pengrajin logam, dan UKM di Trowulan. (SC), FOTO : SUCIATI/PARLE/HR

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen;

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr-

pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

KETUA DPR KOOPERATIF HADIRI SIDANG MKD

Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri undangan Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (7/12/2015). Ketua DPR masuk ke dalam Ruang Sidang MKD sekitar pukul 14.50 WIB, sidang diskors sekitar pukul 15.15 WIB kembali dimulai pukul 16.45 WIB dan sidang selesai pukul 18.10 WIB.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang di sela-sela skorsing sidang mengatakan bahwa sidang Setya Novanto, berlangsung tertutup. Sidang dilangsungkan tertutup karena ada sejumlah hal yang tidak bisa didengar publik. "Sidang tertutup karena ada hal-hal yang tidak terbuka dan itu hak beliau," ujar Junimart.

Lanjut Junimart, dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, tidak ada voting untuk meminta apakah sidang dilakukan terbuka atau tertutup.

"Beliau (Setya Novanto) punya hak tidak mau terbuka. Saya berharap teradu mau membuka sidang ini," tandasnya.

Dalam sidang tertutup tersebut, Novanto membacakan nota pembelaan sebanyak 12 lembar. Novanto juga menolak mengomentari semua pertanyaan terkait rekaman. Dia menganggap rekaman bukti itu ilegal.

Seusai Sidang MKD, Ketua DPR Setya Novanto menyampaikannya kepada awak media bahwa dalam sidang tersebut telah memberikan keterangan dengan se jelas-jelasnya. Dan Novanto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada



Ketua DPR Setya Novanto

MKD yang telah mengundangnya untuk memberikan keterangan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada MKD yang telah mengundang saya untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait masalah ini," kata Novanto. (SKRI), FOTO : DENUS S/PARLE/HR.

INDONESIA PERLU BELAJAR PERTANIAN PADA TIONGKOK



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Pertanian Tiongkok sudah sangat maju. Kini, di setiap provinsi di Tiongkok memiliki akademi pertanian

sendiri. Komoditas pertanian dibangun dari setiap provinsi dan masing-masing memiliki kekhasan sendiri.

Indonesia perlu banyak belajar dari sistem pertanian dari negeri tirai bambu tersebut. Penerapan teknologi pertanian harus pula ditularkan ke Indonesia yang kini sedang mencanangkan kembali swasembada beras.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima delegasi Parlemen Tiongkok, Jumat (4/12), mengatakan, Indonesia pantas mencontoh sistem pertanian Tiongkok. "Saya kira Tiongkok sangat mengedepankan ketahanan dan kedaulatan pangannya. Kita perlu belajar karena seperti disampaikan oleh Pan Yunhe (pemimpin delegasi parlemen Tiongkok), yang paling penting dalam pertanian adalah penggunaan teknologi."

Teknologi pertanian, lanjut Fadli, bukan hanya mekanisasi pertaniannya, tetapi juga bibit, benih, pengairan, dan sebagainya. Ini yang seharusnya menjadi catatan penting bagi Indonesia. Pada bagian lain, Fadli menyatakan, kemajuan ekonomi Tiongkok luar biasa. Sekarang devaluasi yuan saja bisa menyebabkan rupiah melemah. Tiongkok sudah menjadi *leader* di kawasan-nya. (MH), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

Indonesia Tak Boleh Jatuh Dalam Perebutan Kekuasaan AS-Tiongkok



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Qatar H.E. Mohammed bin Abdullah Al-Rumaihi di ruang kerjanya, Kamis (03/12/2015). Wakil Menteri Luar Negeri Qatar didampingi oleh sejumlah Staf Kedutaan Besar Qatar di Jakarta.

Fahri Hamzah sampaikan bahwa Qatar sebagai bagian dari negara berpenduduk Muslim memiliki peran

penting dalam menjaga keamanan kawasan.

“Beliau datang untuk menyampaikan pentingnya Qatar sebagai bagian dari negara berpenduduk Muslim, negara Timur Tengah dan negara Teluk berperan lebih untuk memastikan terjaganya keamanan wilayah, dengan menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan negara besar dan Adidaya seperti Amerika, Rusia, dan negara-negara Eropah lainnya, serta India dan Cina, dan negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia, Iran, Irak, dan seterusnya,” ungkap Fahri.

Politisi PKS ini mengatakan, di kawasan Timur Tengah saat ini masih berkecamuk pertempuran yang melibatkan berbagai negara dengan jumlah korban jiwa mencapai ratusan ribu jiwa dan jutaan orang mengungsi.

“Qatar menawarkan diri menjadi mediator bagi pihak-pihak negara yang berkonflik dengan menjadi tuan rumah pertemuan internasional dalam rangka menemukan solusi *win-win* untuk para pihak,” terang Fahri.

“Pihak Qatar juga menawarkan kesediaan penuh pihaknya untuk menjadi tuan rumah kegiatan diplomasi internasional yang dipandang perlu dilakukan oleh pihak Indonesia,” terangnya.

Fahri Hamzah juga berharap hubungan bilateral yang lebih antara pihak Qatar dan Indonesia dalam rangka hubungan diplomatik dan ekonomi, mengingat perkembangan regional dan global saat ini.

“Wakil Menlu Qatar menyampaikan bahwa Qatar adalah juga bagian dari kawasan Asia sehingga berkepentingan untuk dapat menjadi bagian dari pasar Asia yang saat ini dikuasai oleh Cina, Jepang dan Korea Selatan, dimana Cina tampaknya tengah berusaha menyaingi kekuatan ekonomi Jepang dan Korea Selatan,” terang Fahri.

“Kami tidak mau Indonesia jatuh ke dalam perebutan kekuasaan antara Amerika dan Cina, sehingga dipandang perlu untuk menguatkan hubungan regional dan global antar negara-negara Muslim baik di Asia maupun di luar Asia,” terangnya.

Dalam kunjungannya ke DPR, Wakil Menteri Luar Negeri Qatar mengundang DPR untuk berkunjung ke Qatar.

“DPR menyambut baik undangan dan tawaran Qatar untuk berkunjung ke Qatar dan akan berencana akan merangkaikan kunjungan ke Qatar dan kunjungan ke negara lainnya tahun depan,” tutupnya. (SKR), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK-INDONESIA KIAN HANGAT



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung menerima Ketua Parlemen Tiongkok

Komunikasi politik parlemen maupun pemerintah Tiongkok dan Indonesia kian hangat dan harmonis. Tidak saja parlemen, presiden kedua negara sudah saling kunjung sebanyak empat kali dalam setahun terakhir. Ini menunjukkan hubungan kedua negara sangat strategis dan penting.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan delegasi Parlemen Tiongkok yang dipimpin Pan Yunhe, Jumat (4/12). Banyak topik yang dibicarakan kedua parlemen dalam pertemuan tersebut. Di antaranya yang menarik adalah soal pembangunan trans maritim antara Indonesia dan Tiongkok.

“Kerja sama jalur sutra trans maritim Indonesia-Tiongkok sangat realistis diwujudkan,” kata Fadli, seraya menambahkan, “Selama ini kerja sama dengan Tiongkok hanya di perdagangan. Kini, sudah merambah ke infrastruktur. Dengan begitu, investasi Tiongkok pun bisa berjangka panjang.”

Pan Yunhe sendiri dalam pertemuan itu, mengungkapkan, Tiongkok kini sedang merancang pembangunan lima tahun (pelita) yang ke-13. Angka kemiskinan di Tiongkok masih tinggi. Tapi, pemerintah Tiongkok bertekad akan menghilangkan kemiskinan pa-

da 2020. Pembangunan ekonomi di Tiongkok juga diarahkan pada kampanye ramah lingkungan. “Kami akan membangun Tiongkok yang lebih indah dan damai,” ujar Yunhe.

Hanya saja, lanjut Yunhe, biaya logistik di Tiongkok masih sangat tinggi. Untuk itu, perlu kerja sama dengan yang saling menguntungkan dengan Indonesia, agar biaya logistik bisa lebih ditekan. Selain itu, Yunhe juga menyerukan peningkatan kembali kerja sama politik, ekonomi, dan kebudayaan. Apalagi, katanya, Tiongkok dan Indonesia sama-sama negara besar.

Fadli sendiri menyambut baik semua tawaran rencana kerja sama dengan Tiongkok. Apalagi, Tiongkok sendiri merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Pada bagian lain, Fadli meminta parlemen Tiongkok agar proaktif membangun komunikasi untuk mewujudkan kerja sama keamanan dengan negara-negara ASEAN. Tahun depan, DPR berencana mengunjungi Tiongkok untuk berdialog dengan parlemen dan pemerintahnya.

(MHI)/FOTO:ANDRI/PARLE/HR

Salam Rakyat Indonesia untuk Kamboja

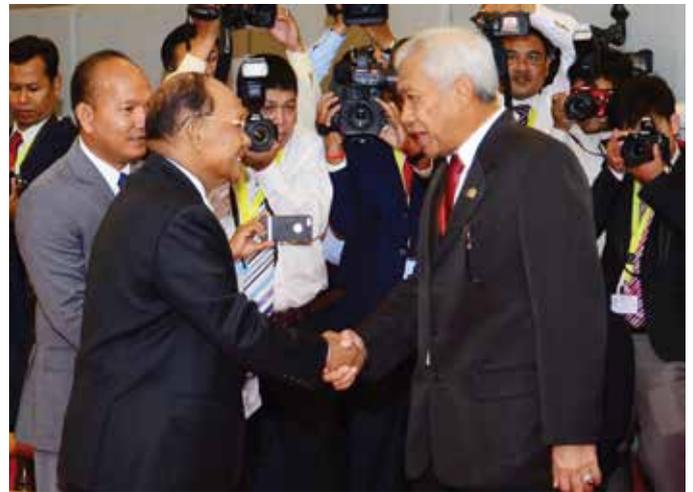
Agus Hermanto, Ketua Delegasi DPR pada Sidang Umum ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) bertemu dengan Presiden National Assembly Kamboja Heng Samrin. Pertemuan berlangsung hangat pada saat agenda ramah tamah (courtesy call) sebelum upacara pembukaan di ruang pertemuan Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Rabu (8/12/15).

“Saya menyampaikan salam hangat dari rakyat Indonesia untuk rakyat Kamboja, juga dari Pimpinan DPR dan wakil rakyat di DPR dengan harapan hubungan baik kedua negara bisa terus kita tingkatkan,” katanya diikuti jabat tangan erat dua pimpinan parlemen ini.

Delegasi DPR juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Heng Samrin yang akan segera memulai tugas kepemimpinan APA pada sidang umum kali ini. Parlemen Kamboja menerima tongkat kepemimpinan dari Parlemen Pakistan untuk masa jabatan dua tahun ke depan.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini juga beramah tamah dengan sejumlah Ketua Delegasi Parlemen anggota APA lainnya. Delegasi lain yang mengirimkan pimpinan parlemennya diantaranya Iran, Korea utara, Pakistan, Saudi Arabia dan Vietnam.

Sementara itu Heng Samrin pada kesempatan berbeda menyampaikan keyakinannya pertemuan parlemen se-Asia ini akan memberikan dampak positif terhadap upaya mengakhiri kekerasan dan beragam bencana yang menimpa kawasan ini. APA lanjutnya perlu menekankan pentingnya



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berjabat tangan dengan Presiden National Assembly Kamboja Heng Samrin

prinsip-prinsip hidup berdampingan dan saling menghargai dalam upaya penyelesaian konflik.

Politisi senior ini juga mengusulkan perlunya dibuat semacam aturan yang menjadi acuan bagi kawasan ini. “APA sebaiknya membentuk protokol regional yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi negara-negara di kawasan dari dampak krisis regional,” tutur dia. (IKY) FOTO:

IBNUR KHALID/PARLE/HR

Delegasi DPR Terima Parlemen Korea Utara

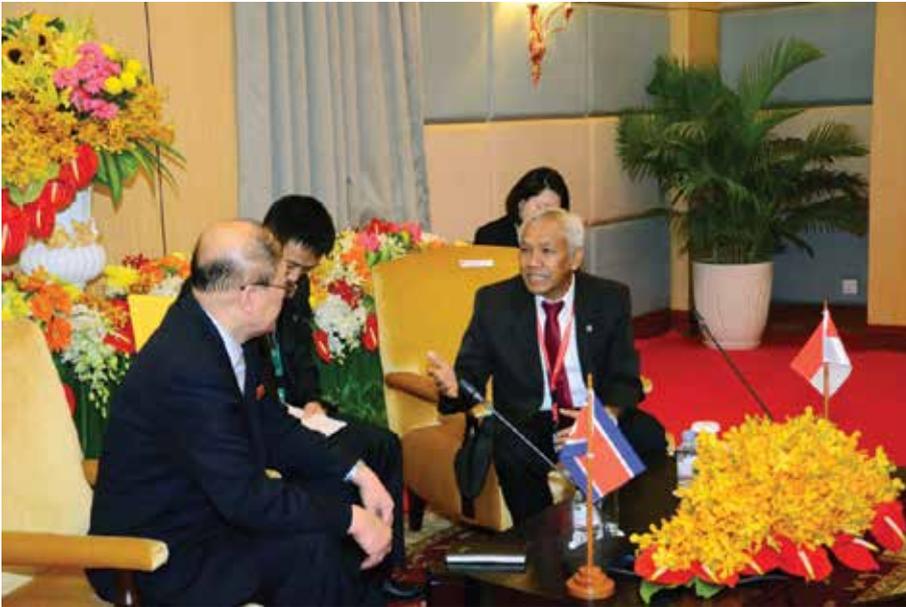
Delegasi DPR dalam Sidang Umum ke-8 APA (Asian Parliamentary Assembly) melangsungkan pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Korea Utara. Dalam pembicaraan yang berlangsung hangat pada saat rehat rapat pleno tersebut menghasilkan sejumlah

kesepakatan diantaranya mendukung peningkatan hubungan dagang dua negara.

“Iya pertemuan bilateral ini atas permintaan kolega kita dari Parlemen Korea Utara, tentu kita siap menerima dalam kerangka membangun hubu-

ngan baik sesama parlemen terutama anggota APA,” kata Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto usai pertemuan di Ruang Tunggu VIP, Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Rabu (9/12/15).

Dalam pertemuan bilateral tersebut Agus yang juga Wakil Ketua DPR didampingi Wakil Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Rofi’ Munawar dan staf sekretariat dari BKSAP. Ia memaparkan upaya meningkatkan hubungan dua negara dimulai dengan kerja sama ekonomi, perdagangan. Selama ini se-



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berdialog dengan Delegasi Parlemen Korea Utara An Tong Chun

jumlah produk Indonesia sudah masuk ke Korea seperti produk karet, sandal dan sabun dengan melibatkan pihak ketiga sehingga tidak optimal.

Ia menambahkan membangun hubungan dengan dua Korea menurutnya mengedepankan prinsip keseimbangan sehingga tidak ada pihak yang

merasa ditinggalkan. Terkait peningkatan hubungan politik dengan Korea Utara lanjut dia perlu dilakukan dengan hati-hati, namun saat ini pilihan bisa dimulai dengan meningkatkan hubungan ekonomi.

Sementara itu Ketua Delegasi Parlemen Korea Utara An Tong Chun menyampaikan apresiasi karena berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Dubes Korut di Jakarta, komunikasi dengan parlemen Indonesia berjalan dengan baik. Ia dapat memahami upaya meningkatkan hubungan di bidang politik harus dilakukan secara bertahap.

“Kami mengharapkan hubungan kerja sama di bidang politik antar parlemen bisa ditingkatkan namun saya mengerti upaya itu tidak bisa dilakukan tergesa-gesa,” tutur dia. Pada kesempatan itu ia menyampaikan undangan secara resmi kepada DPR untuk berkunjung ke Parlemen Korea Utara. (IKY), FOTO : IBNUR KHALID/PARLE/HR.

PENGATURAN MINOL SECARA SPESIFIK BELUM ADA

Keragaman sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap Minuman Beralkohol (Minol) telah menjadi dasar terbitnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang bervariasi.

“Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan Minol, ada juga Perda yang sifatnya mengendalikan Minol seperti di Jayapura, Bandung, dan di beberapa daerah lainnya tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya,” ujar Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Muhammad Arwani Thomafi saat pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, di ruang rapat Gubernur Aceh, Senin (7/12’2015).

Namun demikian, kata Arwani, sampai saat ini pengaturan Minol secara spesifik dalam suatu undang-undang khusus belum ada. Padahal dampak di masyarakat khususnya anak muda semakin meningkat, bahkan sampai melenan korban jiwa.

Arwani menambahkan, pengaturan Minol dalam suatu undang-undang khusus keberadaannya sangat penting, mengingat tingkat konsumsi Minol semakin tinggi, khususnya di kalangan



Ketua Pansus RUU Minol Arwani Thomafi gelar pertemuan dengan Gubernur NAD

generasi muda. Selain itu, lanjutnya, angka kriminalitas karena konsumsi Minol juga tinggi sehingga mengganggu ketentraman dan rasa aman di masyarakat.

Politisi F-PPP ini mengatakan bahwa

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan daerah dengan tatanan kehidupan masyarakat yang sangat agamis dan telah memiliki Perda atau dikenal dengan *Qanun*. Dalam *Qanun* tersebut diatur tentang

larangan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

Oleh karena itu, Pansus RUU Larangan Minol ingin sekali mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan *Qanun* tersebut di masyarakat dan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemda serta bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemda.

Ia berharap semoga dengan diperolehnya masukan dari berbagai pihak, UU yang akan dihasilkan oleh DPR dapat lebih berkualitas.

Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendukung RUU Larangan Minol yang sedang dibahas oleh DPR RI. Mudah-mudahan dengan adanya UU Larangan Minol ini akan memperkuat aturan yang ada di daerah. Pemerintah Aceh telah melahirkan *Qanun Khamar* dan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Yang paling penting adalah sosialisasi daripada UU Larangan Minol ini,” kara Arwani mengingatkan. (IWI) FOTO: IWAN/PARLE/TT

FAKTOR KESELAMATAN HARUS JADI PRIORITAS ANGKUTAN NATARU

Anggota Komisi V DPR Anton Sukartono Suratno menekankan, menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) maka faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama. Manajemen transportasi harus mengutamakan keamanan dan keselamatan. Termasuk meningkatnya jumlah penumpang, harus tetap dijaga jangan melebihi kapasitas.

“Jangan karena jumlah penumpang melonjak, keselamatan penumpang dikorbankan,” kata Anton di sela-sela kunjungan kerja spesifik ke Terminal Amplas, Pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu, Medan, Senin (7/12).

Menurut politisi FPD ini, persiapan pelabuhan Belawan dan Kualanamu sudah cukup baik. Posko sudah didirikan, personil dan pengamanan juga diantisipasi dengan baik. Namun diingatkan factor teknis perlu diperhatikan termasuk masalah mesin, radar dan semua kelengkapan penerbangan dan pelayaran.

Selain itu, lanjut Anton, terkait kesejahteraan awak kapal dan pesawat udara telah mencukupi, tetapi untuk pengemudi angkutan darat tingkat kesejahteraan harus ditingkatkan. “Menyambut Natal dan Tahun Baru, para sopir angkutan umum layak diberikan bonus sekaligus diingatkan untuk menjaga keselamatan penumpang,” katanya dengan menambahkan, dengan kesejahteraan meningkat maka sopir tidak dibebani kejar setoran yang akhirnya bertindak ugal-ugalan.

Ia meminta perhatian pemerintah atas kondisi Terminal Kelas A Amplas Medan yang sangat memprihatinkan



Anggota Komisi V DPR Anton Sukartono Suratno

dan sangat tidak layak. Di tengah pertemuan Tim Komisi V dengan Kepala Terminal, seorang pengemudi angkutan mengemukakan kekesalannya karena jeleknya kondisi terminal tersebut.

Karena itu Anton meminta Komisi V DPR untuk meminta Menhub membantu pengembangan Terminal Kelas A Amplas sebab ini adalah ujung tombak pelayanan masyarakat di darat. Terminal Kelas A Amplas Medan ini dikelola Pemkot, padahal seharusnya terminal Kelas A dikelola oleh Kementerian Perhubungan. (MPI) FOTO: MASTUR/PARLE/HR



Wakil Ketua Delegasi DPR Rofi' Munawar di Sidang Umum ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja

DPR Berikan Catatan Tentang Terorisme dan Ekstrimisme

Rapat Dewan Eksekutif, Sidang Umum ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja membahas sejumlah draf resolusi yang akan dibicarakan lebih jauh dalam persidangan. Wakil Ketua Delegasi DPR Rofi' Munawar menyampaikan catatan pada saat pembahasan draf

resolusi tentang masalah terorisme dan ekstrimisme.

Wakil Ketua BKSAP DPR ini mengingatkan untuk memahami aksi terorisme di sejumlah lokasi di dunia jangan hanya terfokus hanya pada siapa pelaku teror tetapi perlu didalami latar belakang dan dalang dibalik aksi tersebut.

“Dimungkinkan ada oknum-oknum negara besar yang turut mendalangi aksi teror ini. Mereka ingin menyeret sebanyak mungkin wilayah untuk terlibat di arena konflik dan inilah yang harus dihentikan. APA perlu mengam-

bil sikap dalam hal ini,” katanya saat bicara dalam rapat di *Soukea Conference*, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (8/12/2015).

Lebih jauh menurutnya, isu ini bagi sebagian pihak masih dianggap sensitif tetapi pada kenyataannya keterlibatan negara tertentu dalam berbagai konflik berdarah dan memanfaatkan kelompok bersenjata ilegal semakin berdampak luas bagi kemanusiaan.

Masood Islami Under Secretary General APA mengatakan draf resolusi yang pembahasannya berlangsung di Ankara, Turki beberapa waktu lalu

akan diputuskan menjadi ketetapan dalam Sidang Umum ke-8 kali ini. Dalam draf tersebut organisasi parlemen Asia ini mengutuk sejumlah aksi kelompok garis keras yang melakukan serangan teror dan kekerasan.

APA dengan tegas menyebut sejumlah kelompok diantaranya al Qaeda, Boko Haram, ISIS, Jabhat al Nosrah dan rezim Zionist yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan mengabaikan perjanjian internasional yang bertujuan melindungi warga dunia dari kekerasan. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/ PARLE/HR

Panja RUU Migas Komisi VII Jaring Masukan dari Pakar dan Pemprov Riau



Anggota Panja RUU Migas

Pemerintah Provinsi Riau dan Akademisi sekaligus pakar hukum dan pakar perminyakan dari Universitas Islam Riau berharap beberapa perubahan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hal itu disampaikan kepada Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (Panja RUU Migas), saat Panja melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Kamis (3/12).

“Saya berharap adanya perubahan paradigma terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran Undang-undang Migas ke depan. Jika sebelumnya ada kata-kata “selama-lamanya” diberikan hukuman sebagai berikut, maka ke depan kata “selama-lamanya” itu harus diubah menjadi sekurang-kurangnya. Begitupun yang terkait dengan denda dari kata “sebanyak-banyaknya” diubah menjadi “sekurang-kurangnya”. Hal itu tak lain adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku,” papar Syafrinaldi, Pakar Hukum dari Universitas Islam Riau di Kantor Gubernur Riau.

Menanggapi hal tersebut, anggota Panja RUU Migas Komisi VII, Dony Maryadi Oekon mengapresiasi dan menye-

ujui masukan tersebut. Karena jika masih ada kata selama-selamanya dapat diartikan paling lama, sehingga bisa saja pengadilan menjatuhkan hukuman terendah. Namun sebaliknya jika “sekurang-kurangnya” maka pelaku paling sedikit akan menerima hukuman sekurang-kurangnya seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Begitupun dengan kata “sebanyak-banyaknya” untuk denda yang dijatuhkan pada para pelaku pelanggaran Undang-undang Migas ke depan.

Sementara itu Plt Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Riau, Syahril Abdi mempertanyakan belum adanya undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah secara teknis dalam proses pengawasan pengelolaan sumber daya migas yang ada di daerahnya. Pasalnya, dalam undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas mengatur tentang hal tersebut.

“Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur secara teknis tentang mekanisme pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten terhadap pengelolaan sumber daya migas yang ada di daerahnya. Dengan begitu belum ada turunan Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang dapat dijadikan rujukan secara teknis bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan. Akibatnya dilanjutkan Syahril, terjadi stagnasi pada kegiatan hulu Migas,” ungkap Syahril.

Menjawab hal itu anggota Komisi VII Jamaluddin Jafar yang memimpin rombongan, beserta anggota Panja RUU Migas Komisi VIII yang hadir dalam pertemuan tersebut seperti Dony Maryadi Oekon, Adian Yunus Yusak Napitupulu, M.Martri Agoeng, Endre Saifoel, dan Arvin Hakim Thoha sepakat untuk menampung hal tersebut sebagai sebuah aspirasi atau masukan dalam pembahasan perubahan UU Migas No.22 Tahun 2001 mendatang. (AYU), FOTO : AYU/PARLE/HR.

SIDANG UMUM APA KE-8 DIBUKA, MARI BERDIALOG

Asian Parliamentary Assembly (APA) yang didukung oleh 41 parlemen di kawasan Asia memulai hajat dua tahunan Sidang Umum ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, 7-12 Desember 2015. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memimpin delegasi parlemen Indonesia menghadiri upacara pembukaan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, Hun Sen.

“Bagi kita anggota legislator perbedaan dan dialog adalah bagian dari tugas yang kita hadapi sehari-hari. Kita percaya perbedaan dan dialog itu tidak ada batasnya tapi menjadi alat bagi kita untuk mencapai kebaikan semua,” kata Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (9/12/15).

Ini menilai tema sidang umum kali ini, ‘Mempromosikan Perdamaian, Rekonsiliasi dan Dialog di Asia’ adalah pilihan yang tepat menghadapi dinamika permasalahan di kawasan ini. Salah satu program yang perlu dikedepankan menurutnya adalah dialog antar agama dan kepercayaan serta upaya deradikalisasi untuk menahan laju aksi terorisme yang cenderung meningkat.

Agus Hermanto menghadiri agenda organisasi parlemen se-Asia ini didampingi Rofi’ Munawar (wakil ketua delegasi/FPKS), Sumail Abdullah (anggota/



Foto bersama delegasi sidang APA ke-8 di Kamboja

FPGerindra) dan Zulkieflimansyah (anggota/FPKS). DPR sendiri berperan dalam proses penggodokan lima dari 18 draf resolusi yang akan diputuskan dalam sidang umum ini, saat menjadi tuan rumah *Standing Committee on Economic and Environmental Affairs* di Jakarta, 19-20 Agustus lalu.

Sementara itu PM Hunsen dalam sambutannya memaparkan perjalanan panjang mengedepankan dialog telah dapat melepaskan negerinya dari konflik yang meletus dalam aksi kudeta pada Maret 1970. Babak kegelapan

berakhir Januari 1979 setelah bangsa Kamboja bebas dari tekanan rezim Pol Pot, saat itulah dimulai perjalanan panjang perundingan dan dialog yang kemudian mengubah wajah Kamboja.

“Saya percaya parlemen anggota APA, delegasi yang datang dari kawasan Asia akan berpartisipasi aktif membahas tema yang diusung, berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghadirkan perdamaian dan keamanan bagi masyarakat yang hidup di Asia dan di dunia,” demikian Hun Sen.

(IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR

DPR SERUKAN UPAYA PENYELAMATAN WARISAN BUDAYA DI ASIA



Anggota delegasi DPR Zulkieflimansyah dalam Executive Council Sidang Umum APA ke-8 di Kamboja

Sejumlah pernyataan keprihatinan tentang rusaknya sejumlah warisan budaya di kawasan Asia mengemuka dalam sidang *Executive Council* Sidang Umum APA ke-8 di Kamboja, 7-12 Desember 2015. Anggota delegasi DPR Zulkieflimansyah menyampaikan pernyataan perlunya aksi bersama untuk menghentikan pengrusakan ini.

“Perhatian dunia pada kasus pengrusakan di Irak dan Syria yang mengakibatkan kerugian hilangnya aset budaya di negara itu terutama dilakukan oleh kelompok teroris ISIS. Tapi ini bukan hanya terjadi disana di belahan lain kawasan Asia seperti Kamboja, ini juga terjadi,” katanya dalam pertemuan di Ballroom Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (8/12/15).

Menurutnya ada upaya terstruktur untuk menghancurkan warisan-warisan budaya di daerah konflik terutama di Timur Tengah. Pada bagian lain anggota BKSAP DPR ini juga meny-

roti penyelundupan benda-benda budaya yang juga terjadi di Indonesia.

Menghadapi kondisi ini diperlukan langkah strategis menuju harmonisasi kebijakan antara lain dengan menyusun legislasi oleh parlemen anggota APA. Ada tanggung jawab moral untuk menghargai warisan budaya dan tradisi serta mendorong pihak eksekutif agar lebih aktif dalam melindungi objek tersebut.

Sementara itu Ketua Delegasi Parlemen Rusia Rafail Zinurov mengingatkan upaya perlindungan sudah mempunyai basis

hukum yaitu *Hague Convention* yang ditetapkan 14 Mei 1954. Konvensi ini mengatur perlunya menjaga benda-benda budaya pada saat terjadi konflik bersenjata.

“Parlemen Federasi Rusia berharap kerja sama diantara sesama parlemen termasuk organisasi internasional lainnya. Mari kita kesampingkan perbedaan politik untuk menghadapi aksi pengrusakan yang dilakukan terorisme internasional,” tekan dia. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR

KOMISI IV DESAK PEMERINTAH TUNTASKAN PENCEMARAN LIMBAH DI SERANG

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, Panitia Kerja Pencemaran Air Laut mendesak Pemerintah agar segera menuntaskan pencemaran limbah di Kabupaten Serang, Banten.

Komisi IV telah melihat kondisi tambak milik rakyat yang ada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, dimana tambak ikan bandeng dan udang milik rakyat banyak yang tercemar oleh perusahaan - perusahaan besar, antara lain PT Indah Kiat.

“Akibat dari adanya limbah dari beberapa perusahaan yang ada di sekitar daerah ini, mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitarnya, dan ini tentu sangat merugikan para penambang dan rakyat sekitar, untuk itu pemerintah harus menindaklanjuti masalah ini,” kata Viva Yoga kepada wartawan ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang, Selasa (08/12/2015).

Viva menuturkan, akibat pencemaran limbah ini, juga mengganggu kesehatan dan menurunkan pendapatan dari masyarakat sekitarnya.

“Pemerintah harus benar-benar serius menyikapi masalah ini,” ujar Viva. Selain masalah pencemaran limbah, para nelayan ini juga mengeluhkan adanya pen-



Panitia Kerja Pencemaran Air Laut Komisi IV dipimpin Viva Yoga Mauladi meninjau tambak ikan milik rakyat di Tirtayasa, Serang

dangkalan sungai, dan kapal-kapal yang digunakan untuk menangkap ikan juga tidak memadai, karena mereka menggunakan mesin jenis 2 GT, sehingga tidak bisa menangkap ikan.

Lebih lanjut Politisi F-PAN ini menjelaskan, sebaiknya pemerintah melakukan audit investigasi terhadap perusahaan-perusahaan besar yang be-

rada di sekitar Kabupaten Serang.

“Apakah perusahaan-perusahaan itu sudah diaudit atau tidak, untuk itu komisi IV DPR akan menindaklanjuti persoalan ini dan akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, agar masalah ini dapat diselesaikan,” tegas Viva. (AS) FOTO: AGUNG/PARLE/TT

DPR HADIRI SIDANG UMUM KE-8 APA

DPR RI menghadiri Sidang Umum ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja 7-12 Desember 2015. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memimpin delegasi pada sidang yang mengusung tema “Mempromosikan Perdamaian, Rekonsiliasi dan Dialog di Asia”.

Kehadiran Delegasi DPR pada sidang kali ini menjadi penting karena akan melaporkan hasil pertemuan Komite Bidang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Jakarta pertengahan Agustus lalu. Sementara Parlemen



Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Umum ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja

Turki menyampaikan hasil sidang Komite Bidang Politik dan Iran untuk Masalah Sosial dan Budaya.

Sejumlah agenda akan menjadi bahasan anggota APA yang saat ini beranggotakan 41 parlemen di kawasan Asia dan 17 parlemen yang bergabung sebagai observer. Agenda itu diantaranya upaya menghadang aksi terorisme yang cenderung meningkat, kerja sama di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia, upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik.

Dalam Sidang Umum ke-8 ini akan berlangsung pula transaksi kepemimpinan APA dari Pakistan kepada Kamboja. Majelis

Nasional Kamboja dipimpin Ketuaanya Heng Samrin akan menggerakkan organisasi parlemen Asia ini untuk dua tahun ke depan.

Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Kamboja secara khusus menyapa delegasi Indonesia sebelum pertemuan *Executive Council* di *Ballroom*, Hotel Sokha Phnom Penh. "Selamat datang DPR," sapa dia. Sambutan hangat ini diterima Wakil Ketua Delegasi Indonesia Rofi' Munawar (F-PKS) yang didampingi Sumail Abdullah (FP-Gerindra) dan Zulkiflimansyah (F-PKS). (IKY), FOTO : IBNUR KHALID/PARLE/HR.

JANGAN HANYA SOPIR, PENGUSAHA METRO MINI JUGA HARUS DIKENAI SANKSI

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said menegaskan, dalam kasus kecelakaan Metro Mini M 80 dengan KA di perlintasan Tubagus Angke yang menewaskan 18 orang, jangan hanya sopir yang dikenai sanksi tapi pengusahanya juga harus diberikan sanksi.

"Saya sependapat dengan Menteri Perhubungan perlu membenahan khusus terhadap Metro Mini," katanya di sela-sela kunjungan kerja spesifik memantau persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Medan Senin (7/12) sore.

Menurutnya, Komisi V DPR akan memberi perhatian khusus kepada kasus ini. Sebab berdasar informasi bus nekad menyelonong meski pintu pelintasan sudah ditutup. Lagi pula bus tersebut sudah dicabut izin operasinya.

Yang jadi pertanyaan apakah bus yang dicabut izin operasinya bisa melakukan kegiatan yang tidak terkontrol di hari Minggu yang naas itu. Terkait disiplin sopir, ia mengatakan menjadi kewenangan Polri terutama



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M.Said berdialog dengan jajaran otoritas pelabuhan Belawan dan Pelindo II dalam pemberian SIM.

Untuk itu Komisi V akan mengundang Kaorlantas bahas kemudahan pelayanan SIM terpadu. "Saya menekankan khusus untuk sopir angkutan umum tidak bisa sembarangan.

Harus benar-benar seleksi ketat termasuk mentalnya karena menyangkut banyak orang. Sopir angkutan umum sama dengan pilot sama-sama bawa manusia," tegas Muhidin. (MP) FOTO: MASTUR PRANTONO/PARLE/HR

KEBERADAAN MINOL PERLU DIATUR

Pengaturan minuman beralkohol dalam Undang-undang khusus keberadaannya sangat penting. Mengingat, tingkat konsumsi minuman beralkohol semakin tinggi, khususnya dikalangan generasi muda.

"Korban jiwa secara massal dan dalam waktu bersamaan terus bertambah, terutama akibat mengonsumsi minu-

man oplosan," ujar Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Muhamad Arwani Thomafi kepada Parle di Kantor Gubernur Aceh, Senin (7/12/15).

Selain itu, lanjut politisi F-PPP itu, angka kriminalitas yang dikarenakan mengonsumsi minuman beralkohol juga tinggi, sehingga mengganggu ketentra-

man dan rasa aman di masyarakat.

Saat ditanya alasan apa Pansus RUU Minol memilih kunker ke Aceh. Arwani menjawab dikarenakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan daerah dengan tatanan kehidupan masyarakat yang sangat agamis.

Arwani menambahkan, Aceh juga sebagai salah satu daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau dikenal dengan Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.

"Dalam Qanun tersebut, diatur tentang larangan segala bentuk kegiatan



dan atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Besar harapan Pansus RUU Minol DPR RI untuk dapat juga mengetahui permasalahan lain yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan Perda terkait minuman beralkohol yang berlaku saat ini dan mendapatkan masukan berkaitan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Larangan Minol, harapnya. (IWI) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

Pertemuan Pansus RUU Minol dengan Pemprov NAD

Jelang Natal Dan Tahun Baru Komisi V Tinjau Infrastruktur Transportasi Sulut



Tim Komisi V DPR RI dipimpin wakil Ketua Yudi Widiana Adia menggelar pertemuan dengan Dinas Perhubungan Sulut

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau persiapan infrastruktur Bandara, Pelabuhan dan angkutan darat jelang libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (7/12/2015).

Tim kunker spesifik dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia. Tim kunker Komisi V DPR melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Hubud, Hubla, KSOP Pelabuhan Laut Manado, Otoritas Bandara), Angkasa Pura I, Pelindo IV, ASDP, PELNI, BMKG, Basarnas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertempat di ruang VVIP Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulut.

Yudi mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari semua pihak terkait seputar kendala dan masalah yang dihadapi pada berbagai infrastruktur dan transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Sulut dalam menyongsong libur Natal dan Tahun Baru.

“Perlunya menginventarisir masalah dari sekarang agar persoalan yang akan timbul saat hari H bisa diantisipasi sedini mungkin,” ungkap Yudi.

Politisi F-PKS ini juga mendorong agar para *stakeholder* secara gamblang memaparkan persoalan yang ditemui serta solusi yang diusulkan, termasuk penambahan anggaran jika memang itu sangat dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandara (Otban) Wilayah VIII, A.

Widyo. P memaparkan hasil temuannya antara lain ; terdapat beberapa titik pagar perimeter yang terbuka dan memungkinkan orang atau hewan dapat masuk ke sisi Bandara.

“Kami juga temukan bagasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan tidak dipasang label *security check*,” imbuhnya.

Namun demikian Widyo juga mengeluhkan minimnya jumlah SDM serta kecilnya anggaran SPPD di instansinya sehingga proses kerja pengawasan ke berbagai Bandara di Wilayah VIII tidak bisa maksimal.

Usai pertemuan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan melihat langsung fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado.

Lokasi lain yang dipantau oleh Tim Kunker Spesifik Komisi V antara lain kegiatan pembangunan Manado By Pass (Ring Road Manado II) lintas Mamumbi – Karagi – Pelabuhan Laut Manado. Dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Laut Manado, peninjauan jalan lintas Sudirman - Jalan A. A. Maramis – Jalan akses Bandara Sam Ratulangi.

Ikut serta dalam Kunker Spesifik Komisi V DPR RI antara lain Michael Wattimena, Lasarus, Rendhy A. Lamadjido, Budi Yuwono, Roem Kono, Markus Nari, Novita Wijayanti, Willem Wandik, Agung Budi Santoso, Yasti Soepredjo Mokoagaw, Fathan, Mahfudz Abdurrahman, Nurhayati, dan Miryam S. Haryani. (ODJIE) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

Pendidikan Karakter Bangsa Diharapkan Masuk Draft RUU Sistem Perbukuan



Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi masukan dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, yang menyatakan bahwa perlunya materi pendidikan karakter bangsa untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan.

Demikian diungkapkan Kharis, usai memimpin kunjungan Tim Panja RUU Sistem Perbukuan, ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta, Jumat (4/12/15) lalu. Politisi F-PKS itu menilai, pendidikan karak-

ter bangsa perlu diberikan, untuk menghindari generasi muda terjerat dalam pengaruh negatif.

“Kami banyak mendapat masukan tentang konten, salah satunya bagaimana pendidikan karakter bangsa. Sehingga, jangan sampai ada buku yang tidak senonoh, dan mengarahkan ke hal-hal tidak baik,” ungkap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji, mengatakan, untuk meningkatkan jiwa kebangsaan kepada pendidik dan peserta didik, diperlukan materi pendidikan karakter bangsa pada buku-buku yang terkait dengan pendidikan, atau buku referensi.

“Mungkin perlu ada 1-2 halaman wajib disediakan, terkait bagaimana membangkitkan jiwa kebangsaan. Pun jika dimasukkan ke dalam buku non pendidikan, juga tidak ada jeleknya,” kata Baskara.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok Sudarto. Meskipun saat ini sudah ada buku Agama, maupun mata pelajaran PKN, namun juga diperlukan buku penerapan pendidikan karakter bangsa.

“Buku mengenai pendidikan karakter bangsa dirasa penting, walaupun sudah ada buku Agama maupun PKN, namun untuk penerapannya belum ada. Sehingga buku ini dapat memberikan contoh untuk penerapannya,” saran Totok. (SF),

FOTO : SOFYAN/PARLE/HR.

DPR Desak Tuntaskan Kompensasi dan Tukar Guling Waduk Jatigede

Pembangunan waduk di Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, telah tuntas. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, menegaskan, masih tersisa persoalan sosial yang menyangkut hajat hidup masyarakat setempat dan proses tukar guling yang berlarut-larut.

“Sekarang kita berbicara bagaimana pemanfaatan waduk dan sejak awal mencermati Bagaimana situasi sosial ekonomi ekonomi di sini, bagaimana ganti rugi yang dilaksanakan untuk masyarakat yang direlokasi dan masyarakat yang tinggal apakah mereka bisa hidup lebih baik, tentu ini adalah tanggung jawab moral kami,” kata Herman, memimpin rombongan Komisi IV DPR, meninjau pembangunan waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/12).

Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI Dapil Jabar IX Oo Sutisna “Kita tahu bahwa Sumedang itu termasuk daerah miskin di Jawa Barat, minim industri, mayoritas di bidang pertanian. Yang kita takutkan terjadi sedimentasi tinggi, maka jelas dibutuhkan penghijauan berupa penanaman tanaman buah atau tanaman lain yang sesuai,” ungkap anggota dewan yang akrab dipanggil Kang Oo ini. Dia berharap semua kementerian itu berkesepahaman membantu penghijauan jangan sampai ada daerah yang gundul.

Fungsi waduk ini antara lain untuk irigasi 90 ribu ha, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan untuk Pembang-



Tim Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron meninjau Waduk Jatigede

kit Listrik Tenaga Air (PLTA) 110 MW, yang kemudian difungsikan untuk irigasi yang akan mengalir area pertanian seluas 80 ribu hingga 90 ribu ha di Indramayu dan Cirebon.

Mengenai proses tukar guling yang berlarut-larut Herman kembali menegaskan ini merupakan tugas besar yang harus

segera dituntaskan. Persoalan tukar guling ini memerlukan pendalaman dari tim teknis dan administrasi dari semua pihak untuk duduk bersama.

“Meskipun dalam pembicaraan sudah ada alokasi kawasan yang dijadikan area tukar guling, tapi harus ditemukan

bagaimana teknis administrasinya dan lebih lanjut didiskusikan bagaimana ke depannya kawasan Waduk ini tetap menjadi kawasan kehutanan, sehingga tidak perlu dilakukan proses tukar guling,” tegas Herman. Dia menjelaskan proses tukar guling sebaiknya hanya

pada kawasan yang dibangun untuk fasilitas infrastruktur dan fasilitas penunjang lain. Tapi untuk daerah hutan, daerah danau yang direndam itu adalah tetap menjadi kehutanan karena merupakan bagian dari siklus ketersediaan air. (RAY) FOTO: RIZKA/PARLE/HR

Pemkab Mojokerto Harapkan Trowulan Jadi Destinasi Wisata Nasional

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengharapkan wilayah Trowulan menjadi destinasi wisata tingkat nasional untuk lebih mengenal cikal bakal Nusantara.

Pejabat Bupati Mojokerto Ardi Prasetyawan menyatakan cagar budaya yang ada di Trowulan merupakan warisan dari leluhur. “Ini merupakan sejarah yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, cagar budaya nasional ini diperlukan peran pemerintah baik dari daerah dan juga dari pemerintah pusat,” katanya saat menerima Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (05/12/2015).

Menurutnya, cagar budaya ini perlu dilakukan pelestarian secara maksimal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar cagar budaya di Trowulan ini.

“Cagar budaya yang ada ini mencerminkan bangsa yang besar di mata negara demi memperkokoh lahir dan batin,” katanya.

Cagar budaya ini, kata Ardi, diharapkan bisa terus digali dan kedepan bisa membantu pengetahuan bagaimana peradaban zaman dulu. “Trowulan bisa menjadi kawasan pariwisata nasional tata ruang dan menjadi pusat sentral



Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

cagar budaya yang ada di Indonesia,” katanya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 telah membangun sebanyak 137 rumah zaman kerajaan Majapahit yang terbangun di tiga desa di Kecamatan Trowulan.

“Sementara di tahun 2015 ini terdapat sebanyak 154 rumah zaman kerajaan Majapahit dan tahun 2016 akan dibangun sebanyak 160 rumah,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga terus mendorong kepada instansi yang ada di Sidoarjo untuk membuat pagar dengan menggunakan batu-bata untuk menggambarkan kerajaan Majapahit.

“Harapan kami seluruh instansi dan kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bisa menggunakan pagar dari batu bata merah untuk menggambarkan wilayah Majapahit,” katanya. (ISC) FOTO: SUCIATI/PARLE/HR.

MINAT PROFESI PENULIS MASIH RENDAH

Pertemuan antara Tim Panja Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mengungkap bahwa minat seseorang untuk menggeluti profesi penulis masih rendah. Jika dibanding-

kan dengan negara tetangga, jumlah penulis di Indonesia masih relatif sedikit dibanding jumlah penduduknya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almayahri menduga, minimnya minat untuk menjadi penulis, dianta-

ranya diakibatkan oleh kecilnya royalti dan pembajakan yang masif. Demikian ia ungkapkan di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (4/12/15) lalu.

“Royalti penulis buku itu rendah sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah cetak dari penerbit untuk buku-buku itu sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil, berarti royalti kecil. Saya kira ini merupakan suatu permasalahan yang cukup *complicated*, sehingga harus

diurai satu per satu dalam UU Sistem Perbukuan,” kata Kharis.

Adanya pajak royalti yang dibebankan negara kepada penulis semakin memberatkan. Pajak royalti yang mencapai 15 persen, hampir sama dengan pajak penghasilan, Kharis menilai ini cukup memberatkan bagi penulis.

“Munculnya pajak royalti terhadap penulis ini sebenarnya sangat kecil bagi negara, tapi bagi penulis ini sangat berarti. Saya kira mungkin pajak royalti juga perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan. Khusus untuk penulis, agar gairah penulis buku itu menjadi lebih baik,” harap politisi F-PKS itu.

Imbasnya, ada penulis Tanah Air yang menjual karyanya untuk diterbitkan di negara tetangga. Ketika di Indonesia hanya diterbitkan sebanyak 2-3 ribu eksemplar, sementara di Malaysia, misalnya, diterbitkan sebanyak 20 ribu eksemplar.

“Sebenarnya, royaltinya sama, berkisar 10-15 persen. Tapi kalau jumlah cetaknya lebih banyak, ya pasti lebih banyak royalti di luar negeri,” analisa Kharis.

Sementara soal pembajakan, Kharis tak memungkiri bahwa pembajakan sejak jaman dulu kala sudah ada. Tentunya, ini merupakan sesuatu yang harus diberantas. Tapi walaupun belum bisa diberantas 100 persen, namun dengan dukungan toko buku yang lebih banyak menjual buku legal, yang berdampak pada penerbit dan penulis untuk mendapat royalti yang lebih memadai.



Pertemuan Tim Panja Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan dengan Pemerintah Provinsi DIY

“Ketika royalti sudah menjadi sesuatu hal yang menjanjikan, maka orang akan berlomba menuju ke sana. Namun, karena tidak menjanjikan, ya jadi malas,” imbuah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu sebelumnya, perwakilan Forum Lingkar Pena, Muji, meminta agar pajak royalti yang dibebankan kepada penulis agar dihapuskan. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap gairah penulis untuk melahirkan karya-karyanya.

“Besarnya pajak royalti untuk penulis di kisaran 15 persen. Tapi saat ini kita sedang fokus untuk meningkatkan gairah menulis. Mungkin ada kebijakan pengurangan pajak royalti, bahkan kalau bisa malah dihilangkan. Sehingga penulis dapat lebih bergairah untuk menulis,” kata Muji, yang juga mengapresiasi aturan pengurangan harga kertas, sehingga harga buku bisa lebih

murah.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji, juga meminta agar dibuat kebijakan regenerasi terhadap penulis. Ia menyarankan agar penerbit dapat memberikan kesempatan kepada penulis pemula untuk menerima dan menerbitkan karyanya.

“Penulis pemula untuk mencari penerbit sangat sulit. Setiap menulis, hanya dilihat nama penulisnya. Kalau namanya kurang terkenal, tidak laku di penerbit. Mungkin perlu diatur kuota untuk kesempatan kepada penulis pemula menerbitkan tulisannya,” saran Baskara.

Termasuk, lanjut Baskara, Pemerintah mengadakan kursus kepada penulis. Pasalnya, jika tidak ada kursus, kualitas tulisan menjadi berkurang. (SF), FOTO : SOFYAN EFENDI/PARLE/HR.

Panja RUU Sistem Perbukuan Dapat Masukan Luar Biasa



Tim Panja RUU Sistem Perbukuan Komisi X DPR himpun masukan dengan Pemprov DIY

Anggota Komisi X DPR, My Esti Wijayati mengaku mendapat masukan yang sangat luar biasa terkait Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan, saat kunjungan ke Provinsi DI Yogyakarta. Ia mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta.

Sebelumnya, beberapa kepala dinas di lingkungan Kabupaten Bantul dan Sleman juga menyampaikan beberapa masukan, diantaranya terkait konten yang terdiri dari pendidikan karakter bangsa, pembagian jenis-jenis buku, hingga distribusi buku. Pertemuan berlangsung di kantor Dispora DI Yogyakarta, Jumat (4/12/15).

“Dengan mendengar apa yang disampaikan, saya langsung merasa mak

nyes. Didaerah lain, kita hanya berbicara masalah penerbitan, harga buku, hingga penulis. Bahkan boleh saya katakan, tidak ada yang membicarakan konten. Di Yogya, kita mendapat masukan itu,” kata Esti, saat pertemuan.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menambahkan, semenjak pembahasan RUU ini, soal konten belum dibahas secara tuntas. Di pasal draft RUU, hanya diberi keterangan akan diatur kemudian. Sehingga, masukan dari Pemprov DI Yogyakarta ini memberi gambaran Panja RUU Sistem Perbukuan untuk memperkuat pasal-pasal yang di draft RUU.

“RUU ini tidak semata-mata berbicara mengenai harga buku yang murah, pendistribusian, juga menyinggung pendistribusiannya sistemnya bagaimana, ini juga mesti kita atur. Saya kira ini menjadi kesempatan dan juga momentum yang bisa kita jadikan salah satu masukan dan referensi untuk kita masukkan di dalam RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil DI

Yogyakarta ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji, menyatakan, permasalahan distribusi buku masih menjadi persoalan tersendiri.

“Perlu adanya penjelasan tentang distribusi buku, terutama buku untuk pendidikan. Karena kita lihat, 5-6 tahun yang lalu, kita sulit mengatur penerbit yang datang ke sekolah-sekolah secara mandiri, dan rata-rata semakin jelek bukunya, rabatnya semakin tinggi. Ini jadi persoalan bagi kami,” katanya.

Ia menambahkan, memang distribusi buku sampai ke sekolah menjadi tugasnya Pemerintah Daerah, dan penerbit buku sudah dilarang untuk mendistribusikan buku ke satuan pendidikan dasar maupun menengah. Namun yang jadi persoalan kemudian adalah jika buku diterbitkan oleh penerbit swasta kemudian yang distribusikan Pemerintah.

“Jika pada saatnya pelajar atau sekolah membeli sendiri bukunya, maka pendistribusiannya harus diperjelas, dan lebih detail lagi jika tidak didistribusikan oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Sementara sebelumnya, Kadis Pendidikan Kabupaten Bantul, Totok Sudarto menyatakan, masalah konten tak kalah penting diatur dalam RUU, khususnya buku pendidikan.

“Ada buku teks yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping buku teks, juga ada buku pengayaan, referensi, maupun buku pegangan. Apakah mungkin, walaupun buku ini mengatur buku secara umum, apakah mungkin disebutkan dalam RUU, dijelaskan secara detail soal jenis-jenis buku pendidikan,” sarannya.

Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), dan diikuti oleh Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). (SF)

FOTO : SOFYAN EFENDI/PARLE/HR.

PENTINGNYA PENGATURAN SISTEM PERBUKUAN



Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari

Buku merupakan jendela dunia. Buku juga merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa.

Oleh karena itu, maka negara dalam hal ini Pemerintah, perlu mengembangkan kebijakan perbukuan nasional yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari, saat membacakan kata pengantar saat memimpin kunjungan kerja Panja Rancangan Sistem Perbukuan Komisi X DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (4/12/15).

Tim Kunjungan terdiri dari Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan dan My Esti Wijayati dari F-PDI Perjuangan, Yayuk Basuki (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura).

Kunjungan Tim Panja RUU Sisbuk disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Arif Haryono, hingga Forum Lingkar Pena.

“Kita bisa mengetahui apa yang di luar kita, dan berbagai macam yang belum pernah kita lihat, dan pernah kita lihat, itu dari buku. Penelitian yang belum pernah kita bayangkan, hingga sejarah masa lalu juga dari buku. Buku adalah jendela dunia, itulah ungkapan yang paling tepat,” kata Kharis.

Kharis mengaku, kebijakan dan sistem perbukuan yang ada di Indonesia belum tertata dengan baik dan masih menyisakan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain mengenai ketersediaan kertas yang masih sulit diakses oleh penerbit dan percetakan. Harga kertas yang tinggi, membuat penerbit kesulitan untuk menerbitkan

buku.

“Tidak hanya itu, tingginya harga kertas pada akhirnya berpengaruh pada harga jual buku kepada masyarakat. Kondisi geografis yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia, membuat distribusi buku hanya dapat menjangkau kota-kota besar saja. Biaya distribusi yang tinggi menyebabkan buku tidak mudah didapatkan di daerah-daerah terpencil, dan membuat harga buku menjadi mahal,” imbuh Kharis.

Politisi F-PKS itu menambahkan, kebijakan dan sistem perbukuan di Indonesia perlu disusun secara komprehensif sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjadikan buku dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.

Diharapkan, dengan adanya RUU Sistem Perbukuan nanti, masyarakat dapat memperoleh buku berkualitas yang memiliki isi (konten) mencerminkan nilai-nilai kepribadian Indonesia. Masyarakat juga mudah mengakses buku berkualitas dengan harga terjangkau, hingga pengakuan hak cipta

para pelaku industri perbukuan.

Selama pertemuan dengan *stakeholder* dan pelaku pendidikan di Kota Gudeg, Kharis mengaku mendapat banyak masukan yang akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam draft RUU Sistem Perbukuan.

“Selama ini kita hanya mendapat masukan lebih banyak tentang tata kelola, harga, produksi, percetakan, distribusi dan lain sebagainya. Namun, hari ini kami banyak mendapat masukan tentang konten, salah satunya bagaimana pendidikan karakter bangsa, jangan sampai ada buku yang tidak senonoh, mengarahkan ke hal-hal tidak baik,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis berharap, secepatnya dapat menyelesaikan Draft RUU Sistem Perbukuan yang terdiri dari 14 Bab dan 92 Pasal itu. Pasalnya, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dimulai. Sehingga, jika belum ada aturan yang jelas, pasti, akan terjadi permasalahan yang tak terduga di masa mendatang.

“Namun, ini saya kira bukan kita karena khawatir dan ketakutan, tapi harus diawasi dengan aturan yang jelas,” imbuhnya. (SF), FOTO : SOFYAN EFENDI/PARLE/HR.

RUU Kebudayaan Diharapkan Perhatikan Pengelolaan Kebudayaan

Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk menggali aspirasi terkait revisi Rancangan Undang-undang Kebudayaan, yang saat ini dalam proses pembahasan. Tim kunjungan dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat (F-PG).

“Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi X ini dilakukan guna mencari serta meminta masukan kepada pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat tentang revisi RUU Kebudayaan. Baik secara umum, kebijakan maupun masalah kebudayaan Melayu di Provinsi Riau,” kata Mujib, di Riau, Jumat (4/12/15).

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X DPR disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir juga dalam pertemuan sejumlah Kepala Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD Yoserizal Zein, Kadis Pariwisata Fahmizal Usman dan Kadisnakertrans Rasidin Siregar serta Pejabat Pemprov Riau.

Dalam pertemuan, sempat mengemukakan mengenai persoalan pasal kretek dalam draft RUU Kebudayaan. Walaupun sebenarnya pasal ini sudah dihapus oleh Komisi X. Mujib menjelaskan bahwa yang dimaksud pasal itu lebih ditekankan kepada proses pembuatan, bukan soal penggunaan.



Pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin Mujib Rohmat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

“Sebab proses pembuatan kretek sudah membudaya, bahkan di Kudus, Provinsi Jawa Timur telah dibuat Museum Rokok, disana menceritakan proses pembuatan rokok tersebut. Ini mau diatur,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam pertemuan juga terungkap bahwa Pemprov Riau sangat berharap kepada Komisi X agar dalam revisi RUU tentang Kebudayaan nanti dapat lebih memperhatikan pengelolaan kebudayaan di daerah dan persoalan

dalam pengembangan Kebudayaan Melayu Riau.

“Untuk memelihara, menjaga dan membudayakan kebudayaan yang ada di Riau, agar seluruh cagar budaya dan kesenian dapat terkelola dengan baik, tidak seperti sekarang. Jadi ini penting, dan kita minta DPR bisa mendukung dalam perwujudannya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Riau, Kamsol.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAMR) Riau Al Azhar, juga berharap kepada Komisi X DPR agar revisi RUU Kebu-

dayaan benar-benar berpihak kepada peninggalan sejarah.

“Ini penting, agar warisan budaya yang lama bisa terlindungi dan kreasi baru tumbuh, sehingga keduanya harus saling berimbang. Agar sejarah

budaya Riau bisa jaya dan bersanding dengan nuansa modern. Bagaimana produk kebudayaan menjadi tamu yang mempesona dalam peradaban dunia,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang bu-

dayawan Riau yang juga hadir, Taufiq Ikram Jamil menilai UU Kebudayaan saat ini kurang relevan, dimana menu-rutnya sudah seharusnya dipilih oleh pemangku kebijakan. (HR), FOTO : EKA HINDRA/PARLE/HR.

Keberadaan Suku Anak Dalam Perlu Perhatian Komisi X DPR RI



Ketua Tim Kunker Komisi X Mujib Rohmat

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Riau dipimpin Anggota Komisi X Mujib Rohmat dan didampingi 12 orang anggota dewan dalam rangka pembahasan Panja RUU Kebudayaan dan Pariwisata di Riau. Rombongan disambut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar.

Hadir juga dalam pertemuan sejumlah Kepala Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD Yoserizal Zein, Kadis Pariwisata Fahmizal Usman dan Kadis nakertrans Rasidin Siregar. Jum'at (04/12/15).

Dalam pertemuannya dengan Komisi X DPR RI, Tokoh Adat Suku Pedalaman, Haryono menyatakan bahwa Keberadaan Suku Anak Dalam dianggap disepelekan oleh pemerintah sehingga kehidupannya makin tidak jelas. Bah-

kan, saat ini ada yang pergi ke kota-kota berbaur dengan masyarakat lain dan menjadi pengemis.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kami bahkan sering menemukan keberadaan anak suku dalam melintas di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini sudah mulai datang kepunahan budaya kami. Masyarakat Suku Laut, Masyarakat Sakai dan Suku Anak Dalam sudah mulai punah,” kata Haryono.

Haryono menambahkan, pihaknya sering berbicara di Kabupaten maupun Provinsi untuk penyelamatan budaya dan tradisi Suku Anak Dalam. Tapi hasilnya tidak ada. Menurutnya, Suku Laut dan Suku Sakai sudah mulai pudar. Namun hingga saat ini perhatian itu, belum ada ditunjukkan oleh pemerintah daerah.

Haryono juga keberatan dengan sikap pemerintah yang menyebut mereka sebagai komunitas adat terpencil. Menurutnya, justru yang paling duluan memiliki adat istiadat adalah orang Suku Laut, seperti Suku Akit Rukat.

“Jangan sebut terpencil, karena nenek moyang kami adalah pelaut makanya ada masyarakat daratan. Kami malah menganggap orang darat terpencil, bahkan Suku Laut sangat berperan dalam menyelamatkan anda. Tapi kenapa sekarang kami tidak dipedulikan sekarang ini,” ujarnya.

Bahkan Haryono mengancam pemerintah akan melakukan pergerakan jika tidak ada aturan yang melindungi budaya dan tradisi mereka. Karena menurutnya lebih dari 120 ribu masyarakat suku pedalaman di Riau siap beraksi.

“Suatu hari masa itu akan berputar dan kami akan berontak untuk menyelamatkan budaya kami. Kami akan teriakkan jika tidak didengarkan maka kami akan bereaksi. Kami hanya meminta kepada Pemerintah Pusat dan

Daerah melalui Tim Kunker Komisi X ini, untuk menyelamatkan Bahasa, budaya dan kepunahan adat kami,” jelasnya.

Kepada Utusan Masyarakat pedalaman, Mujib Rohmat mengaku akan menampung aspirasi mereka untuk dirancang dalam Undang-Undang Kebudayaan. “Keberadaan Suku Adat Pedalaman adalah cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi memang harus didukung. Nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk membahasnya ditingkat legislatif,” ujar Mujib.

Menurutnya, di Riau, dirinya mendorong pemerintah daerah memelihara keberadaan budaya dan adat masyarakat suku pedalaman. Karena jika berpatokan pada UU Nomor 23 Tahun 2004, masalah budaya diserahkan kepada daerah.

“Daerah juga harus berperan aktif selamatkan budaya dan tradisi yang sudah mengakar itu. Jangan sampai punah, karena itu juga budaya nusantara,” ujarnya.

Sementara itu, Al Azhar Ketua LAMR menginginkan adanya aturan yang melindungi budaya masyarakat suku pedalaman. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelestarian budaya. “Kami dari LAMR terus berupaya mendorong agar budaya itu tetap terpelihara. Termasuk budaya dan tradisi masyarakat Akit, Talang Mamak dan Suku Sakai,” jelas Al Azhar.

Penting juga menurut Al Azhar adanya UU perlindungan keberadaan mereka agar tidak punah, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun ia menekankan pentingnya sinergitas bersama, baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

“Kepunahan itu akan kita atasi bersama, jadi kalau semua mau memelihara, saya rasa akan teratasi,” jelasnya.

(HR), FOTO : EKA HINDRA/PARLE/HR.

RIAU MINTA JATAH MINYAK BUMI 10 PERSEN



Panja RUU Migas himpun masukan di Prov. Riau

Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR RI menjangring aspirasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan akademisi. Daerah yang terkenal dengan julukan negeri Lancang kuning ini merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Dalam pertemuan itu Plt Gubernur Riau yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Riau, Syahril Abdi, dan Pakar Migas dari Universitas Islam Riau, Syafrinaldi sama-sama memberi masukan terkait porsi bagi hasil an-

tara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak swasta sebagai kontraktor atau developernya.

“Selama ini dalam pengelolaan minyak bumi prosentase bagi hasilnya 85 persen untuk negara dan 15 persen untuk swasta yang menjadi kontraktor. Seharusnya disini pemerintah daerah juga diberikan porsi khusus yakni sekurang-kurangnya sepuluh persen dari jatah 85 persen yang dimiliki negara (pemerintah pusat). Jika penghasil minyak itu ada di beberapa kabupaten, maka harus dibagi secara proposional

dari 10 persen jatah pemerintah daerah tadi. Inilah yang diinginkan masyarakat Riau selama ini yang belum terealisasi,” ungkap Syafrinaldi.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VII DPR Jamaluddin Jafar yang memimpin rombongan mengatakan permintaan tersebut hal yang wajar. Namun ia mengingatkan bahwa negara republik Indonesia ini merupakan negara kesatuan, dimana ada daerah-daerah yang tidak memiliki potensi minyak di daerahnya. Ini pun harus mendapat subsidi dari negara.

“Pada dasarnya dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang berbunyi : dimana cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan masukan terkait bagi hasil itu adalah hal yang wajar, namun yang harus diingat negara kita merupakan negara kesatuan yang harus saling membantu dan mensubsidi satu sama lain. Artinya jika ada daerah-daerah yang tidak memiliki potensi minyak di daerahnya, tetap harus disubsidi oleh negara,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini di Kantor Gubernur Riau, Kamis (3/12).

Meski demikian pria yang akrab disapa Jamal ini mengaku akan tetap menampung aspirasi tersebut untuk kemudian dibahas kembali bersama para pakar di DPR. (AYU) FOTO: AYU/PARLE/HR

MKD MINTA KETERANGAN DIRUT FREEPORT SEBELAS JAM

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melangsungkan sidang panjang untuk meminta keterangan Dirut PT Freeport Ma'roef Sjamsoeddin. Sejumlah isu terkait dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR berhasil diklarifikasi dalam persidangan yang berakhir dinihari pukul 00.15 WIB. Itu berarti MKD telah bersidang sebelas jam.

Pertanyaan tentang alasan merekam pertemuan diajukan anggota MKD dari Fraksi PDIP Marsiaman Saragih. “Saya ingin mengetahui apa alasan saudara sehingga merekam pertemuan ketiga dengan SN,” katanya dalam sidang di Ruang Rapat MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/15).

Sementara itu anggota MKD dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi ingin memastikan status SN dalam pertemuan tersebut, apakah sebagai pengusaha atau sebagai Ketua DPR. Baginya itu penting sebelum menetapkan, telah terjadi pelanggaran etik.

Pada bagian lain anggota MKD Akbar Faisal mengajukan pertanyaan yang lebih fokus kepada purnawirawan TNI



Pimpinan dan anggota MKD berdialog dengan Dirut PT Freeport Indonesia

dengan pangkat terakhir Marsekal Muda ini. “Apakah menurut anda dalam pertemuan tersebut telah terjadi praktek

percaloan,” tekan dia.

Menanggapi pertanyaan tersebut Ma’roef membenarkan telah melakukan perekaman dengan menggunakan telepon genggam pribadinya. “Saya merekam untuk kepentingan saya sendiri. Bagi saya merekam itu seperti mencatat saja,” papar dia.

Ia menambahkan setelah pertemuan kedua ia mulai mencurigai ada agenda tertentu yang ingin disampaikan. Baginya sebagai pihak yang mendapat mandat dari perusahaannya ia perlu mengedepankan akuntabilitas. Terkait pertanyaan apakah telah terjadi praktek percaloan? “Saya

rasa demikian,” ujar Ma’roef.

Saksi lain pengusaha Reza Chalid yang juga akan diminta keterangannya, tidak hadir dalam persidangan karena sedang berada di luar negeri. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan akan memanggil untuk yang kedua kalinya.

Sementara untuk jadwal pemanggilan pihak teradu yaitu Ketua DPR Setya Novanto akan dilaksanakan pada hari Senin (7/12). Keputusan rapat internal menurut Junimart pemeriksaan terhadap Ketua DPR akan berlangsung dalam sidang tertutup. (IKY)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

PENCAIRAN DANA PIP MASIH DIPERSULIT



Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program yang didamba masyarakat. Dengan dana ini, masyarakat terbantu dalam hal pendidikan. Namun, temuan Komisi X di lapangan, masih ada kesulitan pencairan dana oleh siswa atau masyarakat. Dalam penyalurannya, Pemerintah bekerjasama dengan Bank BRI dan BNI.

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, perlu ada sistem yang diperbaiki, sehingga pencairan bisa lebih cepat dan tak menemui kendala. Hal ini pula yang menyebabkan penyerapan anggaran untuk PIP tidak maksimal, kurang dari 40 persen.

“Dana PIP itu harus diterima oleh siswa. Tapi ini ada kendala dalam penyaluran, sehingga ada suatu sistem yang perlu kita perbaiki,” kata Hisjam, di sela-sela rapat dengan Sekjen Kemendikbud, Direksi Bank BRI dan Direksi Bank BNI, di Gedung Nusantara

yaitu BRI dan BNI. Karena belum dicairkan kepada siswa, berarti negara mendapatkan jasa keuangan. Kita juga minta ketegasan dari BRI dan BNI berapa jasa keuangan yang diberikan kepada negara, karena tertumpuknya dana yang terlalu besar,” kata Hisjam sembari mengatakan untuk PIP, negara menggelontorkan hingga Rp 9,7 triliun.

Hisjam menganalisa, permasalahan pencairan itu sulit karena permasalahan administrasi yang cukup berbelit. Sehingga diharapkan, kedua bank di tahun mendatang sudah mempunyai sistem yang baik.

“Contohnya, ada yang dimintai surat macam-macam padahal Surat Keterangannya sudah ada, seharusnya langsung dicairkan, tetapi ini buat catatan pemerintah apa yang dijanjikan oleh Presiden RI bahwa dengan memakai kartu itu tidak ada kenyataannya,” kritis politisi asal dapil Jawa

Timur ini.

Sementara itu, Anggota Komisi X Laila Istiana menambahkan, masih ada beberapa permasalahan penyaluran dana PIP itu di beberapa daerah. Pertama, Pemerintah menolak usulan karena tidak ada di Dapodik. Yang kedua, sudah keluar SK dan nomor virtual, namun ketika dicairkan ke Bank, nomor virtualnya berbeda. Akhirnya dana tidak bisa dicairkan.

“Yang ketiga, ada dobel usulan. Kadus atau RT mengusulkan, namun di jawab Dinas bahwa itu dobel usulan. Lalu, siapa yang mengusulkan yang satu lagi? Kan kalau dobel, itu bisa disinkronkan, sama atau tidak. Mungkin ini yang membuat penyerapan menjadi tidak maksimal,” analisa politisi F-PAN itu.

Padahal, lanjut Laila, masyarakat berharap sekali dengan program ini, namun terhambat oleh ketiga hal tadi.

“Selain itu, permasalahan juga ada di bank yang diajak kerjasama itu. Kalau perbankan bisa jemput bola, itu lebih bagus. Walaupun sebenarnya masyarakat juga mau datang ke bank, asal jangan dipersulit,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu sebelumnya, Sekjen Kemendikbud menjelaskan bahwa hingga 30 November 2015 dana yang disediakan dengan total untuk 14,709 juta siswa, sebesar 7,338 triliun, dengan rincian untuk SD 8,7 juta siswa (sebesar Rp 3,566 triliun), SMP 4,4 juta siswa (sebesar Rp 2,571 triliun), dan SMK 1,5 juta siswa (Rp 1,2 triliun).

Dana yang sudah dicairkan oleh siswa sebanyak 5,6 juta siswa atau Rp 2,871 triliun, dengan persentase 38,15 persen, dengan rincian SD 3,9

juta siswa (Rp 1,666 triliun) atau 45,07 persen, SMP 1,09 juta siswa (Rp 711 miliar) atau 24,89 persen, dan SMK 565 ribu siswa (Rp 494 miliar) atau 36,65 persen.

Dana yang belum diambil siswa sebanyak 9,097 juta siswa (Rp 4,467 tril-

ion) atau 61,85 persen, dengan rincian SD 4,816 juta siswa (Rp 1,900 triliun) atau 54,93 persen, SMP sebanyak 3,304 juta siswa (Rp 1,860 triliun) atau 75,11 persen, dan SMK 976 ribu siswa (Rp 706 miliar) atau 63,35 persen.

“Pencairan masih boleh tahun depan.

BPK memberikan kelonggaran, 3 bulan setelah akhir tahun, dan bisa diperpanjang hingga 6 bulan setelah tahun anggaran. Namun, siswa DO tidak bisa, karena syaratnya harus sekolah. Kalau pindah sekolah, bisa,” jelas Sekjen. (SFI/

FOTO: JAKA/PARLE/IW.

LINO BERI PENJELASAN KONTRAK JICT



Dirut PT. Pelindo II dan jajaran diambil sumpah sebelum rapat dengan Pansus Pelindo II DPR

Richard Joost Lino Dirut PT. Pelindo II memenuhi undangan Pansus Angket Pelindo II DPR RI. Lino diberi kesempatan menjelaskan seputar kontroversi kontrak JICT di hadapan Pansus. Dengan tenang, dia berupaya meyakinkan Pansus atas langkah yang diambilnya.

Rapat Pansus yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Kamis (3/12), juga menghadirkan Dewan Komisaris PT. Pelindo II,

Direksi JICT, *Oversight Committee*, dan Deutsche Bank. Saat memberi penjelasan, Lino kerap diinterupsi para anggota Pansus, karena penjelasannya tidak relevan dengan apa yang ingin diungkap oleh Pansus, yaitu fokus pada masalah kontrak JICT.

Dalam penjelasan resminya, Lino mengatakan, JICT bila dikelola sendiri ternyata keuntungannya lebih kecil daripada dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini Hutchison Port Holdings (HPH). Diungkapkan Lino, bila dikelola sendiri nilai keuntungan yang didapat hanya USD 519, 89. Sedangkan bila dikerjasamakan dengan HPH, nilai keuntungannya mencapai USD 668,43.

Dalam poin penjelasannya itu, Lino sekali lagi menegaskan, perbedaan *cost of money* keduanya adalah, Pelindo II sebesar 12,50% dan HPH lebih kecil dari 2,00%. “Kerja sama lebih baik daripada dikelola sendiri, karena mengharuskan HPH yang memiliki *cost of money* lebih murah daripada Pelindo II,” katanya membacakan penjelasan.

Lino menambahkan, pada tahun 1999, *marketshare* Pelindo II masih sebesar 17%. Kini, pada 2014 naik menjadi 28%. Bahkan, kini PT. Pelindo II yang dipimpinnya, memiliki uang *cash* di bank sebesar Rp 18,5 triliun.

Di tengah-tengah penjelasannya, Lino mengaku tak habis pikir, mengapa fakta keuntungan yang begitu besar dipersoalkan oleh Pansus. Mendengar pernyataan Lino itu, Rieke dan anggota Pansus lainnya, sekali lagi mengingatkan Lino agar tak mengomentari apa yang sudah dilakukan Pansus selama menggelar rapat. Lino diminta tak mengomentari kerja Pansus. Sebaliknya, ia diminta fokus saja menjelaskan kontrak JICT, karena tema itulah yang sedang dialami Pansus. (MH) FOTO: JAKA NUGRAHA/PARLE/OD

INDONESIA-HUNGARIA TINGKATKAN DIALOG ANTAR AGAMA

Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia sebagai Negara demokratis memberikan banyak upaya dalam meningkatkan stabilitas dan perdamaian dunia, salah satunya melalui dialog antar agama. Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Kota Godollo, Hungaria baru-baru ini

“Ada persepsi yang salah saat ini, dimana melihat salah satu agama sebagai dalang dari terorisme. Ini pandangan yang salah. Oleh sebab itu perwakilan dari masing-masing agama harus saling berinteraksi, mengenal satu sama lain dan sama-sama menumbuhkan rasa toleransi,” ungkap Nurhayati, sambil menambahkan bahwa kunjungannya kali itu sebagai tindak lanjut komitmen IPU (Inter-Parliamentary Union) dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Sependapat dengan Nurhayati, Walikota Godollo, Gyargo

Gemesi yang menyambut Delegasi BKSAP di depan gonggong perdamaian dunia ini, mengatakan bahwa kerjasama antar Indonesia dan Hungaria juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan dialog antara dua kultur yang berbeda. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim. Sedangkan penduduk Hungaria mayoritas pemeluk agama Kristen. Kondisi ini dapat digunakan untuk saling mempelajari kultur antar dua negara.

Godollo yang merupakan *sister city* dengan Bogor juga sering mengadakan dialog antar agama di kotanya. Pada tahun 2014 yang lalu digelar dialog lintas agama yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia. Sedangkan pihak Hungaria diwakili oleh Kementerian Luar



Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf memukul Gong Perdamaian Dunia

Negeri, Kementerian Pendidikan dan Budaya Hungaria dan Kota Godollo.

Bulan Maret 2015 siswa-siswi SMP Negeri I Bogor memperkenalkan seni dan budaya Indonesia lewat tarian Manuk Dadali, Tari Saman dan Poco-poco, di depan siswa-siswi Hajos Alfred Altalanos Iskola, Godollo, Hungaria.

Bahkan Gong perdamaian dunia yang kini menjadi ikon budaya Kota Godollo ini merupakan sumbangsan Indonesia. Selain di Godollo, gong perdamaian juga ada di Bali, Ambon, Palu, Shandong (China) dan Jenewa (Swiss). Hal itu menjadi simbol harapan dunia yang terbebas dari konflik sara, terorisme, perang yang masih terjadi di belahan dunia seperti yang terjadi di Palestina. (AYU/

BKSAP) FOTO: DOK. BKSAP/PARLE/HR

HUNGARIA APRESIASI PEREMPUAN PARLEMEN INDONESIA

Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Mr. JakabIstvan mengapresiasi banyaknya perempuan yang masuk di dalam Parlemen Indonesia (DPR-RI). Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan delegasi BKSAP DPR RI baru-baru ini.

“Kami melihat banyak sekali perempuan yang ada di delegasi DPR RI ini. Ini berarti Parlemen Indonesia memberikan kesempatan dan akses yang lebih banyak kepada anggota parlemen perempuan, dibanding Parlemen Hungaria. Di Hungaria sendiri tidak mempunyai Parlemen Perempuan yang menjadi ketua di Parlemen ataupun Ketua Komisi untuk saat ini,” ungkap JakabIstvan.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf yang memimpin delegasi kunjungan ke Hungaria, juga mengapresiasi penilaian tersebut. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa kunjungannya kali ini ke Hungaria memiliki misi untuk mempelajari bagaimana parlemen dapat menyelesaikan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mekanisme yang dapat memaksimalkan peran parlemen.

Sebagaimana diketahui Hungaria memiliki Komite pembangunan berkelanjutan di dalam sistem parlemen, serta Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, yang memiliki keterlibatan parlemen di masing-masing institusi.

Baik Indonesia maupun Hungaria sepakat bahwa peran parlemen di



Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Ketua Nurhayati Ali Assegaf foto bersama dengan Parlemen Hongaria

dalam proses maupun implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan sangat krusial. Terutama dengan menggunakan tiga fungsi parlemen yakni, legislasi, penganggaran dan pengawasan dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ditambahkan Nurhayati, peran parlemen perempuan untuk menyelesaikan agenda pembangunan global sendiri telah tertuang dalam deklarasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Kehadiran parlemen perempuan dipercaya dapat meningkatkan pencapaian pembangunan nasional, karena parlemen perempuan dapat memberikan legislasi-legislasi terkait di perlindungan perempuan, edukasi, kematian ibu dan anak ataupun kesehatan, mensukseskan pencapaian negara untuk TPB.

Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan strategi Hungaria yang lebih mementingkan tindakan preventif dibanding tindakan kuratif dalam menangani permasalahan kesehatan. Selain memiliki sistem perawatan kesehatan universal yang dibiayai oleh pajak, Hungaria juga terus mengingatkan bahaya konsumsi alkohol dan merokok di negara ini. Karena dua hal itulah yang menyebabkan permasalahan kesehatan di Hungaria.

“Namun disini saya sangat menyayangkan kurangnya parlemen perempuan sebagai Presiden organisasi parlemen dunia. Karena selama 25 tahun terakhir ini IPU (Inter-Parliamentary Union) belum memiliki presiden perempuan,” tegas Nurhayati yang diaminasi oleh seluruh delegasi. (AYU/BKSAP)

FOTO: DOK. BKSAP/PARLE/HR

KOMISI V APRESIASI SUMUT PERSIAPKAN TRANSPORTASI SAMBUT NATARU



Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M.Said meninjau terminal kelas A Amplas, Medan, Sumut

Komisi V DPR mengapresiasi persiapan Pemprov Sumatera Utara dalam layanan transportasi menyambut Natal dan Tahun Baru 2016 (Nataru). Pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu sudah cukup bagus persiapannya, standar operasionalnya jelas, tata cara pengaturan dan pengendaliannya serta pelayanan bagi penumpang yang datang maupun berangkat bagus sekali.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said bersama 11 anggota Dewan melakukan kunker spesifik meninjau Terminal Amplas, Pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu, Senin (7/12) sore.

Menurut Muhidin, persiapan di Belawan maupun Kualanamu menyambut Nataru semakin ditingkatkan bahkan sudah didirikan Posko bekerja sama dengan Basarnas, BMKG, aparat keamanan. Di kedua tempat ini telah diintegrasikan dengan stasiun KA sehingga kelancaran arus penumpang semakin cepat.

“Harapan DPR kondisi ini dipertahankan sebaik baiknya bahkan ditingkatkan sehingga masyarakat yang merayakan Nataru merasakan kenyamanan

dan keamanan bersama keluarganya tercinta,” ujarnya.

Satu yang menjadi catatan, Terminal kelas A Amplas masih banyak kendala dan terkesan kumuh sehingga perlu ada pembenahan. Komisi V akan meminta perhatian pemerintah pusat untuk pembenahan Terminal Amplas ini.

Ditambahkan Pimpinan Komisi V dari FPG ini, daerah-daerah lain hendaknya mencontoh Sumut yang telah mempersiapkan dengan baik transportasi menyambut Nataru. Yang tak kalah penting faktor keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama melayani masyarakat. “Kalau persiapannya bagus maka pelaksanaannya akan bagus dan penumpang tertib. Sebaliknya kalau persiapannya kurang bagus maka ada celah untuk tidak tertib dan mengganggu kelancaran,” tuturnya.

Transportasi menyambut Nataru ditetapkan pada H-3 tanggal 22 Desember 2015 hingga H+3 tanggal 4 Januari 2016. Otoritas penerbangan di Bandara Kualanamu memperkirakan lonjakan penumpang menyambut Natal meningkat 25% dan Tahun Baru sekitar 4%, sehingga telah disiapkan sejumlah

extra flight.

Di Pelabuhan Belawan juga telah disiapkan pelayanan menyambut Nataru. Pelabuhan yang juga telah terintegrasi dengan Stasiun Kereta Api ini juga menyiapkan beberapa bus untuk mengangkut penumpang ke terminal Amplas.

Dalam kesempatan ini Tim Kunspek Komisi V juga berkesempatan menikmati jalan tol Belawan-Medan dan Tanjung Morawa. Beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera yang sudah dalam tahap konstruksi yaitu Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (60 km) dan Medan-Binjai (15,8 km). Dalam tahap persiapan, ruas Tebing Tinggi-Kisaran (60 km) dan Kisaran-Rantau Prapat (100 km) dan Binjai-Langsa (110 km).

Ikut serta dalam kunspek ini, Sujadi, Damayanti Wisnu Putranti dan Sada-restuwati (F-PDI-P), Salim Fakhry dan Anton Sihombing (F-PG), Andi Iwan Darmawan Aras, Rita Zahara dan Ade Rezki Pratama (F-Gerindra), Anton Sukartono Suratno (F-PD), Hanna Gayatri (F-PAN) dan Fatmawati Rusdi (F-PPP).

(MP) FOTO: MASTUR PRANTONO/PARLE/HR



Panitia Kerja Pencemaran Air Laut Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah segera tuntaskan pencemaran limbah di Kabupaten Serang, Banten, Selasa (08/12)

Foto: Agung/Parle/HR



Komisi VI DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN bahas aset BUMN, Senin (07/12). Foto : Andri/Parle/HR



Humas DPR RI menerima kunjungan siswa-siswi SMA Negeri I Ubud Bali dan penyerahan cinderamata, Selasa (08/12)
Foto : Jaka Nugraha/Parle/HR